

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN
ANTAR NEGARA:
KAJIAN MASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN DI TIMOR
TENGAH UTARA**

***Sosial-ECONOMIC CONDITION OF INTER STATES BOUNDARY
COMMUNITY COMMUNITY INTERSTATE BOUNDARY STUDY
IN NORTH CENTRAL-TIMOR***

Andayani Listyawati dan Lidia Nugrahaningsih Ayal

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Bantul, Yogyakarta
Telp.(0274) 377265, Hp 081328544229, Hp 081210435825
E-mail: andayani307@yahoo.com dan momi504@yahoo.com

Abstract

TTU (North Central -Timor), East Nusa Tenggara Province is one of the land border areas between East Timor and NTT. The border area reflects identically the height of poverty index that can be seen from how huge amount of the pre prosperous families are. This is a descriptive research that aimed to comprehend the border area society on its economic and sosial condition related to the effort to struggle for life. The data sources are taken out from families in North Bikomi, TTU, NTT as the research location. The data were collected through questioner, interview (FGD), observation, and documentary analysis and the data was then analyzed qualitatively. The research found that sosial-economic conditions of society in interstates boundary area which was identical with poverty caused by limited human and natural resources. Therefore it is important, especially for the Ministry of Sosial Affairs and related agencies to collaborate in order to support the improvement of the welfare of the community of the region, for example through mentoring program. This is so that incoming sosial services programs can be enjoyed and benefited in improving sosial welfare of the people in the region.

Keywords: sosial economic condition, interstates boundary, community.

Abstrak

TTU (Timor Tengah Utara) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste. Kawasan perbatasan umumnya identik dengan permasalahan tingginya angka kemiskinan, yang dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera yang bermukim. Penelitian berjenis deskriptif ini bertujuan mengetahui karakteristik masyarakat perbatasan dalam upaya mempertahankan kehidupan dan merupakan kajian masyarakat di TTU, NTT. Sumber data adalah keluarga yang bertempat tinggal di Bikomi Utara, TTU, NTT sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara (FGD), observasi, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat kawasan perbatasan antarnegara dalam kategori terbatas secara sosial ekonomi dan identik dengan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam setempat. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial dan instansi terkait lain agar berkolaborasi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan melalui program pendampingan. Hal ini untuk mengantisipasi agar program layanan sosial yang masuk dapat dinikmati dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perbatasan.

Kata kunci: kondisi sosial ekonomi, masyarakat, kawasan perbatasan.

A. PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan antarnegara salah satunya adalah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan perbatasan dikenal sebagai representasi “serambi” atau pintu gerbang yang selayaknya dikondisikan sebaik mungkin. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 yang membahas tentang wilayah negara menggariskan, bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Tata letak kawasan perbatasan tepatnya berada di wilayah kecamatan. Kawasan perbatasan dibagi dua, yakni kawasan perbatasan darat dan perbatasan laut, khususnya TTU merupakan kawasan perbatasan darat yang berada di wilayah Provinsi NTT berbatasan dengan Timor Leste (Oecusse). Timor Leste merupakan negara baru yang semula adalah salah satu provinsi di Indonesia.

Kawasan perbatasan antarnegara seyogyanya dikelola secara baik untuk meminimalisir timbulnya kerawanan yang diperkirakan dapat mengancam harkat, martabat, nasionalisme, ketahanan sosial dan mempercepat dekulturasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di kalangan masyarakat setempat yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Hakikatnya kawasan perbatasan antarnegara dapat dijadikan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kenyataannya pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan darat sangat minim dan nyaris terbengkalai. Kondisi ini nampak pada pertama, berupa aktivitas ekonomi sangat tergantung kepada negara tetangga. Kedua, aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya berbasis pertanian tradisional berorientasi pada kecukupan kebutuhan. Ketiga, masalah infrastruktur yang jauh dari kata memadai. Hal tersebut sudah mampu menunjukkan akan rendahnya kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan antarnegara pada umumnya mempunyai berbagai permasalahan spesifik. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengidentifikasi permasalahan yang ada di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni 1) Kebijakan pembangunan, artinya kebijakan yang belum berpihak kepada kawasan tertinggal dan terisolir serta strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan; 2) Ekonomi dan sosial budaya, artinya ada paradigma kawasan perbatasan sebagai halaman belakang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, sarana prasarana minim, tingginya angka kemiskinan, rendahnya aksesibilitas, rendahnya SDM, ada aktivitas pelintas batas tradisional, ada tanah adat atau ulayat; 3) Pertahanan dan keamanan, artinya belum disepakati garis batas dengan negara tetangga, jumlah aparat dan sarana prasarana terbatas, ada kegiatan ilegal; 4) Pengelolaan sumber daya alam, artinya pemanfaatan dan pengelolaan SDA belum optimal; 5) Kelembagaan dan kewenangan pengelolaan, artinya belum ada kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu; 6) Kerja sama antar negara, artinya belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerja sama sub regional ataupun nasional dan belum maksimalnya kerja sama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum.

Kondisi kawasan perbatasan secara umum adalah terbatas baik sarana dan prasarana sosial dan ekonomi maupunkurangnya akses pemerintah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain, dikhawatirkan dapat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terhadap masyarakat setempat. Keterbatasan aksesibilitas akan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi pada umumnya masyarakat setempat yang dipengaruhi berbagai kegiatan di negara tetangga atau sangat bergantung pada negara tetangga. Kondisi ini disinyalir akan mengundang kerawanan, misalnya dibidang politik. Orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial karena lebih banyak tergantung

perekonomian negara tetangga, selanjutnya dapat berdampak menurunkan harkat dan martabat bangsa. Sejalan dengan hal itu dan diperkuat hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial tahun 2016 di enam lokasi perbatasan yaitu di kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua yang menyimpulkan minimnya aksesibilitas warga perbatasan, antara lain disebabkan minimnya manajemen data, keterbatasan pengetahuan untuk mengakses program kesejahteraan sosial, minimnya infrastruktur, dan kompleksitas prosedur mengakses program (Endro Winarno, dkk, 2016).

Permasalahan kesejahteraan sosial, terutama kemiskinan menjadi permasalahan yang dominan pada masyarakat di kawasan perbatasan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah keluarga prasejahtera dan kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat yang ada di wilayah negara tetangga. Kondisi ini umumnya dipicu akumulasi berbagai faktor, antara lain rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Hal ini dipandang sebagai imbas dari serangkaian bentuk krisis multidimensi berkepanjangan dan akibat pergolakan pemisahan daerah. Kenyataan ini berpengaruh relatif signifikan terhadap peningkatan jumlah PMKS lainnya seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterasingan, korban bencana dan permasalahan sosial lainnya. Masalah kesejahteraan sosial disebabkan oleh berbagai hal dan saling berkaitan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal menunjuk pada sistem sosial yang mengandung ketimpangan struktural dalam masyarakat, terdapat segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Keterbatasan aset produksi dapat juga menyebabkan kurang pangan dan gizi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan fisik dan mental (Bambang Rudito dan Sutaat, 2009).

Kondisi yang tampak di kawasan perbatasan Kabupaten TTU, NTT secara umum disebut miskin yang terlihat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Oleh karena itu, penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama masalah kemiskinan diperkirakan meningkat setiap waktu. Hal ini akan berdampak kurang menguntungkan bagi kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan kuantitas dan kualitas PMKS secara proposional. Hendaknya diperhatikan kondisi kawasan perbatasan sebab dikawatirkan akan terjadi kesenjangan cukup panjang antara penduduk asli dengan warga Timor Leste.

Kemiskinan di kawasan perbatasan merupakan induk dari berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Penanganan kemiskinan seyogyanya membangun kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. Berkait dengan hal tersebut, TTU yang merupakan salah satu kawasan perbatasan darat juga menunjukkan relatif tidak jauh berbeda permasalahannya dengan kawasan perbatasan lain. Kemiskinan merupakan permasalahan dominan yang dialami masyarakat kawasan perbatasan dibandingkan dengan permasalahan sosial lainnya, seperti ketunaan ataupun kecacatan.

Kecamatan Bikomi Utara merupakan salah satu kecamatan di TTU yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sejalan yang telah disampaikan di muka, bahwa kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Sebagaimana diketahui, bahwa daerah tersebut sebagai salah satu kecamatan yang mempunyai penduduk miskin relatif banyak dibanding dengan wilayah lain. Kemiskinan kawasan perbatasan ditandai dengan berbagai indikator antara lain penghasilan penduduk terbatas, pekerjaan cenderung di sektor informal dan pendidikan ataupun status kepemilikan terbatas.

Kehidupan masyarakatnya dilingkupi berbagai keterbatasan secara sosial ekonomi yang menyebabkan kurang dan atau tidak berdaya. Kondisi ini diperparah dengan alam yang relatif kurang mendukung yaitu cenderung

gersang karena sulit mendapat air bersih. Alam demikian menyebabkan kurang atau tidak subur bagi tumbuh-tumbuhan dan hanya tanaman tertentu yang dapat hidup. Sebagaimana diketahui kehidupan masyarakat setempat sebagian besar mengandalkan dari sektor pertanian dan atau perkebunan dengan kondisi demikian menyebabkan masyarakatnya hidup dalam keterbatasan atau miskin. Kemiskinan yang dialami masyarakat setempat memicu sebagian masyarakat meninggalkan tanah kelahiran untuk mengadu nasib di tempat lain yang dirasa lebih menguntungkan untuk mempertahankan kehidupan. Disatu sisi sebagian masyarakat yang mempunyai ketahanan tetap *survive* untuk tetap bertempat tinggal di daerah asal.

Kajian empirik memperlihatkan bahwa masyarakat sebatas memanfaatkan sumber dan potensi lokal sekedar untuk mempertahankan kehidupannya, tanpa berpikir untuk mengolah agar dapat mempunyai nilai ekonomi lebih. Kondisi ini dipicu keterbatasan kemampuan SDM masyarakat dalam menggali dan mengolah potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa Kementerian Sosial sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat. Untuk mewujudkannya setidaknya ditunjang melalui kebijakan sosial dari aparat pemerintah melalui *stakeholder* dan lembaga sosial peduli penanganan kemiskinan. Sejauh ini dengan segala keterbatasannya masyarakat Bikomi Utara dapat mempertahankan kehidupannya. Apabila disimak lebih lanjut, masyarakat setempat mempunyai peluang pindah penduduk (*imigrasi*) ke Timor Leste, namun hal ini tidak dilakukan. Semangat nasionalisme untuk tetap menjadi warga negara Indonesia relatif kuat dan tetap bersikukuh bertahan.

Pada hakikatnya kesejahteraan sosial menjadi dambaan bagi setiap individu, kelompok, dan masyarakat, baik yang bertempat tinggal di perkotaan, perdesaan maupun di kawasan

perbatasan. Kesejahteraan yang dimaksud yakni terpenuhi kebutuhan dasar berupa fisik, psikis dan sosial. Manusia senantiasa berusaha mendapatkan kesejahteraan dan untuk memenuhinya dilakukan dengan bekerja guna mendapatkan penghasilan. Dalam bekerja diperlukan sumber daya manusia yang handal, namun kenyataannya kondisi sumber daya masyarakat setempat terbatas. Keterbatasannya terlihat dari ketidakmampuannya mengelola sumber daya alam lokal secara optimal yang seharusnya hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini diperkuat dari berbagai referensi, bahwa masyarakat perbatasan kondisi kesejahterannya secara sosial ekonomi disebut terbatas atau miskin, tidak terkecuali di TTU kondisinya tidak jauh berbeda.

Secara logika masyarakat perbatasan sepiantasnya terpenuhi kebutuhannya secara sosial ekonomi namun kenyataannya bertolakbelakang. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dan menarik untuk dilakukan kajian terhadap kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kehidupannya walaupun kondisinya terbatas tetapi tetap eksis. Sejauh ini beberapa penelitian telah dilakukan yang membahas tentang kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan antarnegara, sehingga penelitian yang mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan antarnegara ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah perbatasan.

Berpijak dari ulasan di atas, perlu untuk dilaksanakan penelitian terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan antarnegara yang merupakan kajian pada masyarakat perbatasan antarnegara di TTU, NTT. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan antarnegara di TTU. Tujuan penelitian adalah diketahui kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan antarnegara di TTU, sedangkan manfaat yang diperoleh adalah sebagai masukan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau

Kecil dan Perbatasan Antarnegara serta instansi terkait lainnya dalam menetapkan kebijakan yang berkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan perbatasan antarnegara. Di samping nilai praktis tersebut, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang kondisi sosial ekonomi pada masyarakat yang tinggal di perbatasan.

B. METODE PENELITIAN

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Perbatasan Antarnegara (Kajian Masyarakat Kawasan Perbatasan di TTU) merupakan penelitian deskriptif, mengungkap secara mendalam tentang berbagai hal terkait dengan gambaran permasalahan yang ditinjau dari aspek pemenuhan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang mendasarkan secara fenomenologis dan mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Penelitian ini mengungkap kehidupan masyarakat daerah perbatasan dari aspek kesejahteraan yaitu kondisi sosial ekonomi dengan memahami dan menafsirkan maknanya, selanjutnya juga menggambarkan dari sisi karakteristik, kegiatan, kejadian, dan keadaan lingkungan tempat penelitian berlangsung (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten TTU, Provinsi NTT yang merupakan salah satu daerah perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste. Daerah ini sebagai salah satu kawasan perbatasan darat diantara beberapa daerah batas yang ada di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa daerah perbatasan berada di wilayah kecamatan, maka selanjutnya lokasi yang ditentukan adalah kecamatan paling dekat dengan wilayah batas dan diantara beberapa kecamatan dipilih salah satu, selanjutnya ditetapkan di Kecamatan Bikomi Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebelum pengumpulan data dilaksanakan studi pendahuluan untuk menjajaki kondisi empirik di lapangan. Sumber data penelitian (informan) ditentukan secara insidental (*incidental sampling*) yaitu keluarga

miskin yang kebetulan ditemui peneliti apabila cocok sebagai sumber data dimaksud berdasar kriteria yang telah ditentukan menggunakan kuesioner. Sumber data penelitian ditentukan secara insidental (*incidental sampling*), ditujukan kepada keluarga yang secara kebetulan ditemui peneliti dan apabila dipandang cocok sebagai sumber data dimaksud berdasar kriteria yang telah ditentukan.

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) menggunakan panduan wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif dan mendalam terkait gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi penelitian. FGD (*Focus Group Discussion*) dilaksanakan untuk memperoleh dan memperkaya data tambahan dari informan pemangku kebijakan (*stakeholder*). Studi dokumen dilaksanakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan permasalahan. Data Sekunder diperoleh baik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan sumber lain yang terkait. Observasi dilaksanakan untuk mengamati dan mengetahui kondisi keluarga miskin yang menjadi sumber data seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan, ataupun pekerjaan.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, melalui pengolahan secara manual dan komputasi menggunakan aplikasi program *Excel*. secara sederhana. Data kualitatif selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk dimaknai (*descriptive interpretative*) dan mengacu pada proses analisis dari Miles dan Huberman (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008) yaitu analisis yang digunakan melalui cara mereduksi data, menyajikan data untuk dideskripsikan serta dilakukan penarikan kesimpulan. Proses analisis mengalir sejak awal hingga penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Kawasan Perbatasan Kabupaten TTU, Provinsi NTT

Kabupaten TTU merupakan salah satu kabupaten di NTT. Secara *de jure* Kabupaten

TTU beribukota di Kota Kefamenanu, hal ini berdasar Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Kabupaten TTU mempunyai 24 kecamatan yang tersebar di wilayah tersebut dan salah satunya adalah Kecamatan Bikomi Utara. Kefamenanu mempunyai luas wilayah 2.669,70 km² dan ditempati penduduk sejumlah 243.984 jiwa dengan perincian 120.990 orang laki-laki dan 122.994 orang perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan tidak terpaut banyak, demikian juga persebaran penduduk di setiap wilayah cukup merata.

TTU sebagai kawasan perbatasan, penduduknya secara ekonomi rata-rata memiliki pengeluaran untuk konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hal ini dilihat dari tingkat kemiskinan meningkat 0,99 persen dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 21,59 persen. Sejalan dengan meningkatnya kemiskinan dari tahun sebelumnya, maka implementasi dari indikator kemiskinan lain yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten TTU juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (BPS Kabupaten TTU, 2015).

Kemiskinan yang dialami masyarakat setempat disinyalir dipicu oleh terbatasnya aksesibilitas sehingga masyarakat tidak atau kurang tersentuh beberapa program pelayanan pemerintah. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Tim B2P3KS seperti diilustrasikan di atas yang mengungkapkan minimnya aksesibilitas warga perbatasan. Sejatinnya program pelayanan terutama ditujukan untuk pembangunan manusia dan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan agar memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan yang layak serta mampu menjalani kehidupan yang produktif untuk mendapat kesejahteraan. Kenyataan, masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan belum mencapai kesejahteraan, seperti yang dialami masyarakat perbatasan. Selain kemiskinan yang mendominasi permasalahan kawasan perbatasan utamanya di TTU kenyataannya ada sejumlah permasalahan sosial lain, antara lain keterlantaran, kecacatan, ketunaan ataupun kebencanaan.

Beberapa jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berhasil direkapitulasi tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Jenis PMKS di TTU

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Fakir miskin	6.178 orang
2	Anak terlantar	3.486 orang
3	Penyandang cacat	3.007 orang
4	Wanita rawan sosial ekonomi	3.622 orang
5	Anak nakal	96 orang
6	Rumah tidak layak huni	9.763 unit
7	Keluarga Bermasalah Sospsi	148 klg
8	Pekerja Migran Bermas Sos	12 orang
9	Keluarga Rentan	816 klg
10	HIV	1orang
11	Komunitas Adat terpencil	264orang
12	Korban bencana Sosial	478orang
13	Pengemis	2 orang
14	Gelandangan	2 orang
15	Anak jalanan	1 orang
16	Korban tindak kekerasan	125 orang
17	Balita terlantar	1.087 orang
18	Eks narapidana	264 orang
19	Korban bencana alam	375 orang

Sumber: BPS Kabupaten TTU, 2015

Data tersebut memperlihatkan, bahwa permasalahan sosial terbanyak di TTU adalah berkaitan dengan masalah kemiskinan, seperti rumah tidak layak huni, masalah fakir miskin, dan wanitarawansosialekonomi. Jenis permasalahan dominan tersebut menempati peringkat tertinggi dibanding permasalahan sosial lain seperti anak terlantar, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, dan permasalahan sosial lain. Hal tersebut tidak terlepas kondisi sosial ekonomi sebagai akibat dari kemiskinan yang disandang penduduk. Ikhwal kondisi miskin tersebut dipicu oleh sumber daya alam terbatas berupa lahan pertanian yang kering, kurang subur, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga kurang mampu bereksplorasi dalam mengelola sumber dan potensi lokal yang sejatinnya dapat digunakan bagi kemakmuran masyarakat. Faktor penyebab tersebut pada akhirnya senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat yang serba terbatas. Hal ini tidak dapat diingkari karena potensi sumber daya alam yang tersedia

di kawasan perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian.

Kecamatan Bikomi Utara beribukota di Napan, dan wilayah ini berbatas langsung dengan Timor Leste. Kecamatan Bikomi Utara merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten TTU yang terbentuk pada tanggal 30 Juni 2008. Wilayahnya seluas 70,64 km² yang terbagi menjadi sembilan desa, yaitu Desa Napan, Tes, Faennake, Haumeni, Banain A, Baas, Banain B, Banain C, dan Sainoni.

Lokasi kecamatan mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Naibenu dan Distrik Oeccuse (Timor Leste), sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bikomi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Miomaffo Timur, dan sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Oeccuse (Timor Leste).

Jumlah penduduk Bikomi Utara sebanyak 6.148 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 3.134 jiwa dan perempuan sejumlah 3.014 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.535 KK. Jumlah penduduk tersebut menunjukkan perbandingan seimbang antara jumlah laki-laki dengan perempuan. Sejumlah penduduk tersebut mempunyai tingkat pendidikan beragam, seperti tamat SD sebanyak 3.169 orang, tidak tamat SD sebanyak 2.090 orang. Sementara yang tamat SLTP sebanyak 436 orang sedangkan yang tamat SLTA sebanyak 326 orang dan yang tamat Perguruan Tinggi sebanyak 122 orang (Monografi Kecamatan Bikomi Utara, 2015). Gambaran di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Bikomi Utara berpendidikan setingkat SD, sedangkan yang berpendidikan menengah setingkat SLTP dan SLTA serta berpendidikan tinggi jumlahnya terpaud banyak dibandingkan dengan setingkat SD. Kenyataan ini membuktikan bahwa masyarakat setempat berpendidikan rendah. Keterbatasan pendidikan tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga yang terbatas yaitu tidak ada dana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Untuk mengetahui jumlah keluarga kategori miskin berikut ini disampaikan gambaran jumlah penduduk miskin di wilayah Bikomi Utara yang dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Persebaran Jumlah Keluarga Miskin
di setiap Desa di Kecamatan Bikomi Utara

No.	Desa	Jumlah KK	KK Miskin
1	Napan	262	128
2	Tes	147	140
3	Faenake	233	206
4	Haumeni	192	168
5	Banain A	186	178
6	Banain B	110	108
7	Banain C	142	137
8	Sainoni	175	161
9	Baas	96	88
Jumlah		1.543	1.314

Sumber: Monografi Kecamatan Bikomi Utara, 2015

Rekapitulasi data pada tabel tersebut memperlihatkan, bahwa jumlah keluarga miskin di Kecamatan Bikomi Utara cukup banyak. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan penduduk di kecamatan tersebut sebanyak 1.543 jiwa dan tergolong miskin sebanyak 1.314 jiwa yang tersebar di sembilan desa. Desa yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Desa Faenake yang ditunjukkan sebanyak 206 keluarga miskin dari 233 jumlah keseluruhan keluarga miskin. Sementara dari 186 jiwa penduduk Desa Banain A, sebanyak 178 jiwa tergolong miskin. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi desa lain. Gambaran ini menyiratkan, bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Bikomi Utara tergolong berekonomi rendah.

Ilustrasi di atas menunjukkan, antara jumlah penduduk di Kecamatan Bikomi Utara secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang tergolong miskin relatif berimbang. Kemiskinan tersebut ditandai dengan tingkat pendapatan rendah, pendidikan relatif rendah, dan keterbatasan dalam aksesibilitas. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan, antara lain terbatasnya memperoleh akses pendidikan, pekerjaan atau minimnya layanan kesehatan secara maksimal.

Hal terpenting bagi keluarga miskin adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama yang bersifat fisik yaitu makanan, sedang kebutuhan lain bersifat sekunder bahkan tersier kurang dan atau tidak menjadi prioritas.

Terkait dengan aspek rohani, penduduk Kecamatan Bikomi Utara mayoritas menganut kepercayaan agama Katholik, yakni sebanyak 6.136 jiwa dan agama Protestan dianut sebanyak 12 jiwa, sedang penduduk yang menganut agama atau kepercayaan lain hampir tidak ada. Kegiatan keagamaan senantiasa ditingkatkan pembinaan dan kualitas ketaqwaan serta keimanan secara rutin. Ditinjau dari aspek sosial budaya, sejauh ini hubungan persaudaraan masyarakat Bikomi Utara dinilai cukup erat. Hasil wawancara terhadap sumber data keluarga miskin terungkap, bahwa penduduk masih menjunjung berbagai peradaban terutama sosial budaya. Nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dan kekerabatan masyarakat setempat masih kuat dan dilaksanakan, seperti musyawarah antar penduduk yang biasanya dilakukan di tempat tertentu disebut *Lopo*. Pesta perkawinan dengan memotong babi apabila belum terlaksana dianggap sebagai hutang. Apabila salah seorang anggota keluarga meninggal, disemayamkan terlebih dahulu di rumah. Budaya pesta di daerah setempat masih dijunjung tinggi meski ekonomi masyarakat terbatas. Tradisi lain yang masih dilaksanakan adalah budaya saling berkunjung antarsaudara. Sebagaimana diketahui akibat konflik antarnegara sebuah keluarga anggotanya ada yang menjadi warga negara Indonesia dan Timor Leste, sehingga dalam satu keluarga terdapat dua kewarganegaraan. Budaya saling berkunjung terlihat pada saat saudara yang menjadi warga Timor Leste mengalami musibah, misalnya peristiwa kematian maka saudara yang menjadi warga negara Indonesia diijinkan berkunjung ke Timor Leste maksimal selama tiga hari. Sementara apabila acara perkawinan hari berkunjung sebatas satu hari. Semua prosedur pelaksanaannya melalui ijin pos perbatasan. Menyimak beberapa hal di atas akan terlihat bahwa kegiatan tersebut terkandung nilai empati, gotong royong, kerja sama, dan kesetiakawanan sosial yang tertanam secara turun temurun,

implementasinya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan modal sosial sebagai kekuatan bagi peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perbatasan antar negara.

Deskripsi Sumber Data Penelitian

Pada bagian ini dideskripsikan sumber data penelitian seperti identitas, status kepemilikan hingga pekerjaan yang ditekuni. Dalam rangka pengolahan data secara manual dan dibantu komputasi diterapkan terhadap sumber data penelitian sebanyak 60 orang kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 264 orang. Berdasar data yang dihimpun mayoritas tingkat pendidikannya sampai jenjang Sekolah Dasar sebanyak 110 orang (42 persen) bahkan yang tidak tamat dan tidak mengenyam pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 86 orang (33 persen). Hanya sedikit yang dapat menyelesaikan pendidikan setingkat SMP, SMA, hingga PT terdata sebanyak 64 orang (30 persen). Kenyataan ini menunjukkan, bahwa sumber daya manusia ditinjau dari tingkat pendidikan cukup rendah. Kenyataan ini diperkuat oleh Camat Bikomi Utara, bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disebabkan keterbatasan kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan lanjut. Di samping itu program wajib belajar sembilan tahun belum terlaksana secara maksimal. Hasil wawancara yang didukung hasil FGD, mengungkap bahwa faktor keterbatasan ekonomi menyebabkan tidak mampu melanjutkan pendidikan lanjutan, sehingga banyak ditemui anak putus sekolah dan menjadi terlantar. Aspek keterbatasan fasilitas sekolah juga turut mempengaruhi anak menjadi putus sekolah.

Merupakan kelaziman, bahwa dengan pendidikan yang memadai akan memperoleh pekerjaan layak. Hal ini jauh dari pengharapan karena mayoritas pendidikan yang ditamatkan sebatas pada tingkat rendah. Adanya asumsi bahwa pendidikan yang terbatas akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh yakni sebanyak 127 orang (48 persen).

Setelah dirunut lebih lanjut terungkap, bahwa pekerjaan sebagai buruh dimaksud berupa buruh di bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok dengan alam yang cenderung kering namun pengelolaan sumber daya lokal tetap dilaksanakan. Tanaman komoditi terutama jagung merupakan andalan daerah setempat. Pekerjaan lain yang banyak ditekuni adalah peternakan, terutama babi sebagai pekerjaan sampingan yang diharapkan dapat menambah pendapatan.

Jenis pekerjaan tersebut ditekuni karena tidak ada alternatif pekerjaan lain. Pekerjaan sebagai petani ladang atau buruh menjadi pilihan walaupun sumber dan potensi daerah setempat relatif gersang dan kurang subur yang disebabkan struktur tanah tidak bisa menyimpan air. Konsekuensinya sebatas tanaman keras atau tanaman ladang yang mampu tumbuh karena tidak membutuhkan banyak air, sedang tanaman lain yang membutuhkan banyak air hampir tidak bisa tumbuh subur. Hal tersebut mempengaruhi bahan konsumsi makanan dominan masyarakat setempat berupa jagung karena tanaman ini merupakan sumber andalan masyarakat setempat.

Berkait responden dalam menekuni jenis pekerjaannya sejauh ini mereka menjawab hasilnya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan secara layak. Hasil rekapitulasi menunjukkan penghasilan yang diperoleh rata-rata Rp 2.632.000,-/bulan. Penghasilan tersebut dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang rata-rata menanggung empat hingga lima orang anggota keluarga. Besaran penghasilan tersebut dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya jumlahnya relatif meningkat namun tetap saja dirasakan terbatas. Keterbatasannya disebabkan semata-mata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sedang kebutuhan bersifat sekunder bahkan tersier tidak menjadi prioritas. Sebagaimana diketahui, biaya hidup di daerah relatif tinggi, harga kebutuhan sehari-hari cukup mahal seperti harga satu buah jeruk mencapai Rp 5.000,-, bensin eceran seharga Rp 8.000,- hingga Rp 10.000,-/liter.

Ditinjau dari aspek kepemilikan tempat tinggal diketahui, bahwa tempat tinggal mayoritas milik sendiri sebanyak 57 orang (95,0 persen) dan hanya sebanyak tiga orang (5,0 persen) menyatakan sewa atau kontrak. Melalui pengamatan dari kondisi empirik di lapangan memperlihatkan tempat tinggal yang ditempati cukup sederhana, sebanyak 39 unit (65 persen) terbuat dari papan (disebut *blebag*), dari bambu sebanyak 13 unit (22 persen) dan terbuat dari tembok diplester dan tanpa plester masing-masing sebanyak empat unit (7 persen) dengan luas bangunan rata-rata 35,33². Ciri khas rumah di daerah NTT mayoritas beratap seng/asbes sebanyak 47 unit (78 persen), lainnya sebanyak 11 unit (18 persen), dan terbuat dari ijuk/rumbia sebanyak dua unit (3 persen). Mengenai lantai rumah mayoritas terbuat dari tanah sebanyak 35 unit (58 persen), terbuat dari semen sebanyak 22 unit (37 persen), dan lainnya sebanyak 3 buah (5 persen). Hasil observasi menunjukkan, bahwa hampir semua rumah kondisinya cukup memprihatinkan dan tidak layak huni, namun hingga saat ini belum pernah mendapat bantuan Program Bedah Rumah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan aspek rumah tidak layak huni belum menyentuh daerah setempat.

Dari ilustrasi di atas dapat digarisbawahi, bahwa warga masyarakat kawasan perbatasan antarnegara pada umumnya dalam kondisi terbatas atau miskin. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan secara layak. Pernyataan ini sejalan dengan konsep Randi R, bahwa kemiskinan terkait dengan kemampuan dasar untuk makan dan memenuhi kebutuhan lainnya (2007). Seseorang dikelompokkan miskin apabila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Sejatinya setiap individu, kelompok dan masyarakat terutama yang berada di kawasan perbatasan mendambakan hidup sejahtera lahir dan batin. Berkaitan dengan kesejahteraan tidak terlepas dari besaran penghasilan dan pengeluaran. Sebagaimana diketahui besaran penghasilan

rata-rata sejumlah Rp 2.632.000,- penghasilan terendah sebanyak Rp 120.000,- dan tertinggi sebanyak Rp4.240.000,-, sedangkan rata-rata pengeluaran sumber data per bulan diketahui sejumlah Rp 831.890,-, adapun pengeluaran terendah sebanyak Rp 124.167,- dan tertinggi sebanyak Rp3.014.167,-.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Perbatasan Antarnegara dalam Memenuhi Kesejahteraan Keluarga

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial diselaraskan dengan konsep pembangunan sosial yang mencakup pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan, dan kesejahteraan (Hardiman dan Midgley dalam Edi Suharto, 2005). Secara konseptual kesejahteraan sosial bermakna sebagai suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan, baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat (Edi Suharto, 2009). Hal ini selaras dengan yang disampaikan PBB tentang kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga telah menggariskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dikaitkan dengan kondisi kehidupan masyarakat kawasan perbatasan, maka dapat dikatakan bahwa keberadaannya jauh dari kondisi sejahtera.

Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah krusial yang perlu segera ditindaklanjuti karena menyangkut eksistensi masyarakat, khususnya masyarakat tergolong rentan atau miskin. Masalah kesejahteraan sosial dapat

ditimbulkan oleh kondisi sosial dan pelayanan yang kurang atau tidak baik dapat menjangkau penerima pelayanan (Adi, 2005), misal sarana pendidikan dan atau kesehatan yang kurang memadai. Masyarakat demikian seyogyanya menerima bantuan dan jaminan sosial yang merupakan hak dasar manusia dan dilakukan secara tepat. Apabila hak masyarakat tidak terpenuhi dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya konflik sosial. Kondisi ini akan terjadi khususnya pada kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah terpencil, terisolir, dan di kawasan perbatasan, seperti halnya di Bikomi Utara. Sebagaimana diketahui, bahwa hakikat permasalahan terpenting adalah menyangkut belum terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan perumahan serta terpenuhinya aksesibilitas masyarakat. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pada masyarakat perbatasan menunjukkan, bahwa masyarakat belum bisa mendapatkan berbagai layanan pemerintah secara optimal terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, komunikasi ataupun keterampilan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang disinyalir menghambat pengembangan ekonomi pada kawasan perbatasan.

Berdasarkan telaah dokumen diperoleh literatur baik dari BNPP maupun laporan berkait dengan masalah daerah perbatasan memperlihatkan, bahwa masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya mengandalkan sumber dan potensi lokal berupa hasil pertanian dan ternak. Kenyataan tersebut diperkuat dari hasil FGD yang mengungkap upaya masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang ada, seperti jagung, kemiri, ataupun buah asam dan tanaman keras lainnya, namun pengelolaannya kurang maksimal karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Adapun peternakan yang dilaksanakan masyarakat berupa ternak babi dan ayam. Semua itu sebatas untuk memenuhi kebutuhan harian, dan sedikit yang dijual. Sebagaimana masalah lain di kawasan

perbatasan, seperti maraknya perdagangan secara illegal yaitu melalui *jalan tikus*. Sementara untuk mencari penghasilan tambahan sebagian masyarakat memilih menempuh jalan secara illegal tersebut walaupun banyak resiko yang dihadapi. Barang yang diperjualbelikan dimaksud terutama barang kebutuhan harian seperti sembako (terutama beras dan gula pasir) karena nilai jual yang diperoleh dari barang tersebut cukup tinggi. Kondisi yang beresiko ini ditempuh semata-mata untuk mencari tambahan penghasilan. Salah seorang tentara yang bertugas di pos perbatasan mengungkapkan, hal tersebut dilaksanakan pada malam hari dengan menyusuri kawasan hutan dan harinyapun tidak bisa dipastikan, sehingga cukup sulit untuk dideteksi aparat.

Informasi dari sumber data lain terungkap bahwa upaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga dilakukan dengan kegiatan perdagangan lintas batas yang diselenggarakan satu bulan sekali pada minggu ketiga setiap bulannya. Tempatnya berada sekitar garis batas tetapi masih berada di wilayah Indonesia. Di pasar terjadi transaksi antara penjual dengan pembeli yang berasal dari warga Indonesia dan Timor Leste. Barang yang diperjualbelikan beragam, antara lain elektronika, makanan, hewan ternak hingga barang kebutuhan harian (sembako) dengan nilai jual relatif tinggi tetapi mayoritas berupa barang kebutuhan alat-alat rumah tangga dan bahan makanan. Menurut pengakuan salah satu pedagang mengungkapkan perolehan pendapatan menurutnya relatif cukup. Hasil wawancara terungkap:

“Sudah beberapa bulan lamanya saya berjualan di pasar ini, yah lumayan hasilnya untuk tambah biaya harian. Penghasilan saya sebagai buruh sangat kecil dan tidak menentu besarnya setiap bulan, jadi saya berusaha untuk memperoleh tambahan penghasilan walau dengan cara berjualan seperti ini.”

Keberadaan pasar di lintas batas mencerminkan aspek sosial ekonomi berupa interaksi ekonomi sekaligus terjalin komunikasi antar warga pembeli dan penjual yang merupakan warga Indonesia dan Timor Leste.

Berdasar pengamatan memperlihatkan, bahwa kondisi saat berlangsungnya kegiatan pasar cukup ramai, kendaraan pengangkut umumnya menggunakan *colt pick up* membawa barang dan ataupun warga datang ke pasar untuk kegiatan transaksi jual beli barang. Warga Timor Leste membeli barang untuk dijual di negaranya, demikian juga sebaliknya. Hasil wawancara dengan salah seorang pembeli:

“Saya sudah hampir tiga tahun membeli barang yang dibawa warga Timor Leste, biasanya beras dan gula pasir. Barang tersebut selanjutnya saya jual kembali di daerah sekitar sini, karena harganya relatif tinggi mengharap mendapat keuntungan berlebih. Saya menempuh jalan seperti ini saja supaya lebih aman, walaupun harganya dari penjual sedikit lebih mahal tetapi daripada saya harus melalui *jalan tikus*. Berbagai cara ditempuh dalam rangka memenuhi ekonomi keluarga, melakukan aktivitas jual beli di pasar hingga menempuh *jalan tikus* untuk sekedar mendapatkan barang murah.”

Selama ini program pemerintah yang diterima sebatas pada Raskin (beras untuk rakyat miskin) dan Kube (kelompok usaha bersama), kendati belum secara maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menangani permasalahan tersebut saat ini pemerintah kecamatan Bikomi utara dan Dinas Sosial sedang merintis program pemberdayaan bagikeluarga rentan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Program tersebut berupa pelatihan membuat sirup dan dodol dengan bahan dasar buah asam yang dilakukan terhadap keluarga rentan sebanyak 30 orang. Pelatihan tersebut berupa pengelolaan sumber daya alam berupa buah asam yang banyak tumbuh di daerah setempat supaya mempunyai nilai ekonomi lebih. Kegiatan tersebut bernilai positif, namun sejauh ini belum ada tindak lanjut sehingga terlihat program yang dicanangkan terputus dan belum ada perubahan pada masyarakat secara signifikan, karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat masih lekat dengan keterbatasan.

Sejauh ini kemiskinan di kawasan

perbatasan masih tetap ada karena dipengaruhi oleh minimnya sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pihak terkait disinyalir belum menyentuh dan menangani permasalahan sosial ekonomi secara maksimal melalui programnya dalam rangka memberi kesejahteraan terhadap masyarakat setempat. Hal ini tidak jauh berbeda seperti yang dialami masyarakat kawasan perbatasan di TTU, NTT.

D. SIMPULAN

Dari uraian yang telah digambarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan antarnegara di kabupaten TTU Provinsi NTT menunjukkan secara sosial ekonomi hidup dalam keterbatasan atau identik dengan kemiskinan. Kemiskinan disebabkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang relatif rendah. Dari sumber data yang dihimpun memperlihatkan tingkat pendidikan masyarakat mayoritas rendah yaitu sebatas sekolah dasar bahkan tidak tamat. Pendidikan rendah asumsinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan dan pekerjaan yang ditekuni sebagai mata pencaharian mayoritas penduduk adalah sebagai buruh berpenghasilan terbatas. Dalam rangka mempertahankan kehidupannya masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam lokal yang hasilnya juga terbatas karena kondisi alam relatif kering sehingga harapan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan sejauh ini belum terjangkau.

Atas dasar kesimpulan rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Penanganan Kemiskinan Pesisir, Pulau Pulau Kecil, Tertinggal, dan atau Perbatasan antarnegara serta instansi terkait lain untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung meningkatkan aksesibilitas masyarakat kawasan perbatasan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan, misalnya melalui pemenuhan berbagai layanan kesejahteraan sosial pendampingan. Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan agar program layanan sosial yang masuk dapat memenuhi aksesibilitas masyarakat sehingga dapat dinikmati dan bermanfaat guna meningkatkan

kondisi sosial ekonomi secara layak agar tercapai kesejahteraan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 1) Kepala B2P3KS yang telah menugaskan peneliti ke daerah perbatasan antar negara; 2) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial TTU, NTT dan Camat Bikomi Utara beserta jajarannya yang telah memberi ijin kepada peneliti untuk turun lapangan di Kecamatan Bikomi Utara; 3) Konsultan atas bimbingan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI Press
- Akifah Elansary. (2016). *Makalah Workshop Analisis Masalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Daerah Perbatasan Antar Negara* dari Ditjen Penanganan Fakir Miskin Pesisir, PPK dan PAN di b2P3KS Yogyakarta.
- BNPP. *Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan*. <https://www.bappenas.go.id/index.php/download/file/kiew/11631/3866> diunggah 10 September 2017.
- Bambang Rudito dan Sutaat. (2009). *Masalah Kebutuhan dan Sumber Daya di Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal. Bagian IV. Pongkar Potret Sebuah Desa di Perbatasan (Studi Masalah dan Kebutuhan)*. Jakarta: P3KS Press.
- BPS. (2015). *Data dan Informasi Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara*.
- Edi Suharto. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Pedoman Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Cet. I, Bandung: Alfabeta
- Endro Winarno. (2016). *Potret kesejahteraan Di Tapal Batas. Analisis Masalah, Potensi, dan Sumber kesejahteraan Sosial di Kawasan Perbatasan Antarnegara*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Humphrey Wangke. *Politica* Vo.4, No.1 Mei 2013
- Luthfi Muta ali. (2014). *Pengelolaan*

Wilayah Perbatasan NKRI.

Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada

Monografi Kecamatan Bikomi Utara tahun 2015

Ismawan Harijono. (2016). *Makalah Workshop Analisis Masalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Daerah Perbatasan Antar Negara* dari BNPP di B2P3KS Yogyakarta.

Randi R dan Riant Nugroho.(2010). *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta:EleX Medio Komputindo

Susetiawan.(2015). *Tanggapan Pakar terhadap Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan Kementerian SosialRI.* Yogyakarta:tidak dipublikasikan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

